ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v6i5.11474

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 15 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI PUSKESMAS TIGO BALEH KOTA BUKITTINGGI)

Analysis of the Implementation of the Health Istithaah Program for Hajj Pilgrims Based on Permenkes Number 15 of 2016 (Case Study at Tigo Baleh Community Health Center, Bukittinggi City)

Shonia Ramayany & Ariyun Anisah
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
shonia.be@gmail.com; ariyunanisah@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 15, 2026	Jul 13, 2026	Jul 25, 2026	Jul 30, 2026

Abstract

Hajj is an obligation for Muslims who are able to perform it, including in terms of health or health *istithaah*. The government issued *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji* as a guideline for examining, developing, and determining the health status of Hajj pilgrims. This study aimed to describe the implementation of the Hajj pilgrims' health *istithaah* program based on *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016* at the Tigo Baleh Community Health Center, Bukittinggi City. The study employed a qualitative approach with a descriptive method and a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the Bukittinggi City Health Office, the Tigo Baleh Community Health Center, and Hajj pilgrims. The results showed that the program's implementation generally complied with the applicable provisions, including phased health examinations,

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

health development, determination of *istithaah* status, recording and reporting, and the provision of human resources and supporting facilities and infrastructure. The program's implementation was also adjusted to *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023* by incorporating urine examinations for women of reproductive age and screening for dementia and cognitive function. This study concludes that the Hajj pilgrims' health *istithaah* program at the Tigo Baleh Community Health Center has been implemented comprehensively and in an integrated manner. These findings provide practical implications regarding the need to strengthen continuous health development, improve personnel competence, optimize information systems, and enhance cross-sectoral coordination to improve the health preparedness of Hajj pilgrims.

Keywords: Health *Istithaah*; Hajj Pilgrims; Hajj Health; Community Health Center Services; Health Examination

Abstrak: Ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, termasuk dari aspek kesehatan atau *istithaah* kesehatan. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji sebagai pedoman pemeriksaan, pembinaan, dan penetapan status kesehatan jemaah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan program *istithaah* kesehatan jemaah haji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 di Puskesmas Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Puskesmas Tigo Baleh, dan jemaah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, meliputi pemeriksaan kesehatan secara bertahap, pembinaan kesehatan, penetapan status *istithaah*, pencatatan dan pelaporan, serta penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 melalui penambahan pemeriksaan urine bagi perempuan usia subur serta skrining demensia dan fungsi kognitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program *istithaah* kesehatan jemaah haji di Puskesmas Tigo Baleh telah dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi. Temuan ini memberikan implikasi praktis berupa perlunya penguatan pembinaan kesehatan secara berkelanjutan, peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi sistem informasi, dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kesiapan kesehatan jemaah haji.

Kata Kunci: Istithaah Kesehatan; Jemaah Haji; Kesehatan Haji; Pelayanan Puskesmas; Pemeriksaan Kesehatan

PENDAHULUAN

Kewajiban bagi umat Islam yang mampu (istithaah), sesuai syariat Islam dan termasuk salah satu dari lima rukun Islam disebut ibadah haji (Widiarti et al., 2026; Wulandari et al., 2023) Selaku salah satu negara terpadat di dunia, Indonesia ialah rumah bagi mayoritas umat Islam dan termasuk negara pengirim jamaah haji terbanyak tiap tahunnya (Wuryan, *et al*, 2021).

Setiap orang wajib melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Haji ialah rukun Islam yang wajib menurut firman Allah SWT. menurut QS. Ali Imran 3: 97 menurut dalil

tersebut, ibadah haji termasuk bentuk kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi mereka yang telah dinyatakan mampu (Singka & Ericca, 2020; Al-Ajarma, 2021). Pemenuhan syarat istithaah, yakni secara fisik ataupun mental dijadikan aspek krusial bagi tiap muslim yang hendak menunaikan ibadah haji. Urgensi kondisi kesehatan ini didasari oleh karakteristik ibadah haji yang didominasi oleh aktivitas fisik, termasuk sa'i, tawaf, wukuf, melontar jumrah, serta bermalam di Muzdalifah dan Mina. Hambatan tersebut kian meningkat akibat faktor perjalanan jauh dan paparan cuaca ekstrem di tanah suci. Alhasil, pemeriksaan kesehatan wajib dilalui jemaah untuk menetapkan status pemenuhan persyaratan mereka (Aldossari et al., 2019; Sumarkandi et al.,2025).

Salah satu dimensi dari konsep Istithaah dapat ditinjau melalui aspek kesehatan. Dalam konteks ini, Istithaah kesehatan jemaah haji merepresentasikan kapasitas keseharan jemaah yang mencakup dimensi fisik dan mental yang diukur melalui prosedur pemeriksaan akuntabel supaya pelaksanaan ibadah dapat berjalan selaras dengan syariat Islam (Permenkes, 2016). Kemudian, Istithaah ini dirumuskan sebagai standardisasi persyaratan kesehatan yang wajib dipenuhi jemaah guna menjalani rangkaian ibadah secara mandiri, sekaligus meminimalkan risiko yang dapat mengancam keselamatan personal ataupun jemaah lainnya (Rudyanto et al., 2019). Maknanya, Istithaah kesehatan ini secara otomatis dijadikan indikator utama dalam mengukur kesiapan jemaah selama keberangkatan, proses pelaksanaan, beserta pasca pelaksanaan ibadah haji.

Tingginya jumlah jemaah risik serta masih ditemukannya kasus kematian jemaah haji menunjukkan bahwa upaya pembinaan, pemeriksaan, dan penetapan istithaah kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Dari aspek angka kematian, kesehatan jemaah haji Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji (Rustika et al., 2020; Roikhan & Rahmah, 2025). Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa sepanjang periode 2018–2024, penyakit jantung dan pneumonia menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian jemaah Indonesia di Arab Saudi. Pada tahun 2024 tercatat 461 jemaah meninggal dunia, dengan penyakit jantung sebagai penyebab kematian tertinggi. Sebagian besar jemaah yang meninggal merupakan kelompok lansia dan memiliki penyakit penyerta yang telah diderita sebelum keberangkatan (Kemenkes, 2025).

Di kota Bukitinggi jumlah jemaah haji menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data kantor kementerian agama kota Bukittingi, pada tahun 2024 terdapat 329 calon jemaah haji yang mengikuti manasik haji gabungan sebagai bagian dari

persiapan keberangkatan ke tanah suci. Pada tahun 2025, jumlah calon jemaah haji meningkat menjadi 348 orang yang tergabung dalam dua kelompok terbang (kloter). Peningkatan jumlah jemaah ini juga diikuti dengan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.

Menurut Kemenkes (2017), tujuan pendirian istithaah kesehatan Haji yakni guna memfasilitasi pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji supaya jamaah bisa menunaikan ibadahnya sesuai ketetapan. Tujuan istithaah ini guna menjamin bahwa calon jamaah siap melaksanakan ibadah haji sesuai persyaratannya dan bukanlah untuk menghalangi mereka melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Untuk memastikan kesejahteraan jamaah Haji dari negara asal mereka ke Tanah Suci dan kembali lagi, perlu untuk meningkatkan langkah-langkah pembinaan kesehatan dan menerapkan pemeriksaan kesehatan yang lebih menyeluruh.

Melalui penilaian istithaah kesehatan, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan calon jemaah, memberikan pembinaan yang diperlukan, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap berbagai risiko kesehatan yang berpotensi terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan yang seragam, pemerintah menetapkan Permenkes RI No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Regulasi ini dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan program istithaah kesehatan di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini diharapkan proses penilaian beserta pembinaan kesehatan jemaah haji dapat dilakukan secara terstandar di seluruh wilayah Indonesia.

Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 menempatkan puskesmas sebagai salah satu pelaksana utama program istithaah kesehatan. Puskesmas selaku fasyankes tingkat pertama mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Puskesmas bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan awal, memberikan edukasi kesehatan, melaksanakan pembinaan kesehatan, serta melakukan pemantauan kondisi kesehatan calon jemaah haji secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program istithaah kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program di tingkat puskesmas.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan program istithaah kesehatan di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan program, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan sarana pemeriksaan kesehatan, rendahnya partisipasi calon jemaah dalam kegiatan pembinaan kesehatan, serta tingginya prevalensi

penyakit tidak menular pada calon jemaah haji. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tujuan program tidak tercapai secara optimal apabila tidak ditangani dengan baik (Kemenkes, 2023). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berminat melaksanakan kajian yang rinci melalui sebuah penelitian berjudul Analisis Pelaksanaan Program Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 (Studi Kasus di Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program istithaah kesehatan jemaah haji berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 di Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi, meliputi pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan, penetapan status istithaah, pencatatan dan pelaporan, serta dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan program kesehatan jemaah haji.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan rancangan studi kasus (case study) (Poltak & Widjaja, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam, holistik, dan kontekstual pelaksanaan program istithaah kesehatan jemaah haji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program istithaah kesehatan jemaah haji.

Partisipan atau informan dalam penelitian ini terdiri atas Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Kepala Puskesmas Tigo Baleh, dan jemaah haji. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan pelaksanaan program istithaah kesehatan jemaah haji. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan program istithaah kesehatan jemaah haji, observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program secara langsung di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pelaksanaan program istithaah kesehatan jemaah haji (Chand, 2025)

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Ahmad & Muslimah, 2021; Waruwu, 2024) Analisis data difokuskan pada enam indikator penyelenggaraan istithaah kesehatan jemaah haji, yaitu pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan, penetapan status istithaah, pencatatan dan pelaporan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), serta ketersediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, hasil penelitian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 serta regulasi kesehatan haji yang terkait.

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Proses penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data, serta penyusunan hasil penelitian. Waktu dan lama pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan waktu penelitian yang sebenarnya karena informasi mengenai bulan dan durasi penelitian belum dicantumkan secara spesifik dalam naskah penelitian.

HASIL

Pemeriksaan kesehatan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara sistematis dimulai dari pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, hingga penilaian kemampuan fungsional jemaah. Apabila ditemukan penyakit kronis atau faktor risiko spesifik, jemaah akan dirujuk ke RS untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis sebelum hasil pemeriksaan diinput ke dalam aplikasi Siskohatkes. Pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan haji di Kota Bukittinggi telah menerapkan sistem rujukan yang baik sehingga setiap keputusan mengenai kondisi kesehatan jemaah didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang objektif. Temuan tersebut ditunjang oleh temuan wawancara yang mengungkapkan bahwasanya seluruh hasil pemeriksaan kesehatan harus lengkap sebelum dapat diproses melalui aplikasi Siskohatkes.

Pembinaan Kesehatan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan kesehatan terhadap calon jemaah haji di Puskesmas Tigo Baleh telah dilaksanakan secara berkesinambungan mulai sejak masa tunggu, menjelang keberangkatan, hingga setelah jemaah kembali dari Tanah Suci. Pembinaan kesehatan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan, konseling individu, manasik kesehatan haji, latihan kebugaran, tes kebugaran, serta edukasi kesehatan melalui media digital berupa grup WhatsApp. Pembinaan

tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan jemaah sehingga mampu memenuhi persyaratan istithaah kesehatan sebelum keberangkatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada upaya preventif untuk meningkatkan kemampuan jemaah dalam menjalankan ibadah haji.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan dilakukan secara individual maupun kelompok. Pembinaan individu diberikan kepada setiap jemaah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatannya, terutama bagi jemaah yang mempunyai penyakit penyerta berupa diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, atatupun penyakit paru. Petugas kesehatan memberi edukasi terkait krusialnya kepatuhan mengkonsumsi obat, aktivitas fisik, pengaturan pola makan, beserta pengendalian penyakit kronis sebelum keberangkatan. Sementara itu, pembinaan kelompok dilaksanakan melalui kegiatan manasik kesehatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, calon jemaah diberikan pemahaman mengenai kondisi lingkungan di Arab Saudi, cuaca ekstrem, aktivitas fisik selama pelaksanaan ibadah haji, serta langkah-langkah menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci.

Penetapan Status Istithaah Kesehatan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status istithaah bukan ditentukan berdasarkan penilaian subjektif petugas kesehatan, melainkan melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai indikator kesehatan sesuai standar nasional. Dalam proses tersebut, Puskesmas berperan sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan sekaligus penginput data, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan validasi data sebelum diteruskan ke sistem nasional. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan status istithaah telah menerapkan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga mampu meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa komponen utama yang menjadi dasar penentuan status istithaah, yaitu hasil pemeriksaan penyakit kronis, fungsi jantung, kadar gula darah, pemeriksaan kesehatan jiwa menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), pemeriksaan fungsi kognitif menggunakan Abbreviated Mental Test (AMT), penilaian aktivitas sehari-hari (Activities of Daily Living/ADL), serta tes Mini Clock untuk menilai daya ingat dan fungsi kognitif calon jemaah. Apabila salah satu komponen menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar, maka calon jemaah akan dirujuk terlebih dahulu ke dokter spesialis untuk mendapatkan pengobatan sebelum dilakukan evaluasi ulang.

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama penetapan status istithaah bukan untuk menggugurkan keberangkatan calon jemaah, tetapi memberikan kesempatan agar kondisi kesehatannya dapat diperbaiki terlebih dahulu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyakit yang paling banyak mempengaruhi penetapan status istithaah kesehatan adalah hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, obesitas, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas calon jemaah haji termasuk kelompok usia lanjut yang memiliki penyakit degeneratif sehingga memerlukan pemantauan kesehatan secara intensif sebelum keberangkatan

Dari temuan penelitian, terlihat bahwasanya pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program istithaah kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh telah dilaksanakan menggunakan aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) yang merupakan sistem informasi resmi Kemenkes RI. Seluruh data hasil pemeriksaan kesehatan jemaah diinput secara digital oleh petugas puskesmas dan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sebelum diteruskan ke tingkat provinsi maupun pusat.

Selain menggunakan sistem digital, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Puskesmas Tigo Baleh masih melakukan pencatatan secara manual melalui buku registrasi, rekam medis, dan kartu kesehatan jemaah haji. Pencatatan manual tersebut berfungsi sebagai dokumen pendukung apabila terjadi kendala pada sistem elektronik maupun sebagai arsip pelayanan kesehatan di puskesmas. Sementara itu, proses pelaporan dilakukan secara berkala dalam bentuk rekapitulasi data kesehatan yang dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk dilakukan verifikasi sebelum diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya sistem pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual dan digital sehingga mampu meningkatkan keamanan serta keakuratan data kesehatan jemaah.

Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, khususnya ketika terjadi kesalahan penginputan data pada aplikasi Siskohatkes. Sistem yang telah mengunci data tidak memungkinkan petugas melakukan perubahan secara langsung sehingga diperlukan prosedur administratif melalui Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, hingga Kementerian Kesehatan untuk membuka kembali data yang telah dikunci. Kondisi tersebut menyebabkan petugas harus bekerja secara lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan selama menginput data. Kemudian, keterbatasan jumlah petugas yang secara langsung menangani program kesehatan haji juga menjadi tantangan

tersendiri karena sebagian besar tenaga kesehatan masih harus melaksanakan pelayanan rutin di puskesmas.

Ketersediaan SDM, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketersediaan SDM di Puskesmas Tigo Baleh secara umum telah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program kesehatan haji. Setiap puskesmas di Kota Bukittinggi memiliki tim penyelenggara kesehatan haji yang terdiri atas dokter, penanggung jawab program haji, petugas surveilans, petugas promosi kesehatan, petugas imunisasi, petugas laboratorium, serta tenaga farmasi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Selain itu, sebagian besar petugas memiliki pengalaman yang cukup lama dalam mengelola program kesehatan haji sehingga telah memahami prosedur pemeriksaan dan penetapan status istithaah kesehatan.

Ketersediaan sarana dan prasarana, Dari temuan penelitian, terlihat bahwasanya sarana beserta prasarana di Puskesmas Tigo Baleh pada umumnya telah memadai untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dasar. Fasilitas seperti alat pengukur tekanan darah, alat ukur tinggi badan, timbangan berat badan, elektrokardiografi (EKG), serta peralatan pemeriksaan dasar lainnya tersedia dalam kondisi baik dan dilakukan kalibrasi secara berkala untuk menjaga keakuratan hasil pemeriksaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pemeriksaan yang memerlukan fasilitas lebih lengkap, seperti pemeriksaan radiologi dan laboratorium klinik, Puskesmas Tigo Baleh bekerja sama dengan RSUD Bukittinggi sebagai rumah sakit rujukan.

PEMBAHASAN

Pemeriksaan kesehatan, merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan istithaah kesehatan jemaah haji. Tujuan pemeriksaan ini guna mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah haji secara menyeluruh sehingga bisa dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan dan penetapan status istithaah (Taufik, 2020). Dari temuan penelitian, terlihat bahwasanya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas Tigo Baleh sudah terlaksana sesuai ketetapan yang berlaku, yakni melalui tiga tahapan pemeriksaan, meliputi pemeriksaan tahap pertama saat penentuan status kesehatan awal, pemeriksaan tahap kedua menjelang penetapan keberangkatan, dan pemeriksaan tahap ketiga sebelum keberangkatan di embarkasi. Selain mengacu pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2016, pelaksanaan pemeriksaan juga telah mengikuti pembaruan kebijakan melalui Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/2118/2023 yang menambahkan beberapa komponen pemeriksaan,

seperti skrining kognitif dan pemeriksaan urin bagi wanita usia subur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi terbaru tersebut telah dilaksanakan oleh petugas kesehatan sehingga proses penegakan status istithaah menjadi lebih komprehensif. Temuan studi ini ditunjang oleh pendapat Green yang mengungkapkan bahwasanya pelayanan kesehatan yang efektif harus didukung oleh proses identifikasi masalah kesehatan melalui pemeriksaan yang sistematis sebelum dilakukan intervensi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi faktor risiko sehingga dapat dilakukan upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif secara tepat sasaran. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemeriksaan kesehatan jemaah haji merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan fisik, mental, beserta kemampuan fungsional yang dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan kemampuan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Kemenkes, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan sesuai standar di Puskesmas Tigo Baleh menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan haji.

Pembinaan Kesehatan, Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan dilakukan secara individual maupun kelompok. Pembinaan individu diberikan kepada setiap jemaah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatannya, terutama bagi jemaah yang mempunyai penyakit penyerta berupa diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, atatupun penyakit paru. Petugas kesehatan memberi edukasi terkait krusialnya kepatuhan mengkonsumsi obat, aktivitas fisik, pengaturan pola makan, beserta pengendalian penyakit kronis sebelum keberangkatan. Sementara itu, pembinaan kelompok dilaksanakan melalui kegiatan manasik kesehatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, calon jemaah diberikan pemahaman mengenai kondisi lingkungan di Arab Saudi, cuaca ekstrem, aktivitas fisik selama pelaksanaan ibadah haji, serta langkah-langkah menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci.

Perubahan perilaku kesehatan seseorang diberi pengaruh oleh faktor predisposisi, faktor pendukung, beserta faktor penguat. Pengetahuan yang diperoleh melalui edukasi kesehatan akan meningkatkan kesadaran individu untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, pembinaan kesehatan yang dilaksanakan secara konsisten bisa menumbuhkan meningkatkan kepatuhan jemaah dalam mengendalikan penyakit kronis, mengikuti pengobatan, serta mempersiapkan kondisi fisik sebelum keberangkatan (Green, 2005).

Tetapi, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan pada studi ini. Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah masih adanya calon jemaah yang menyembunyikan kondisi kesehatannya karena khawatir tidak dapat diberangkatkan apabila diketahui menderita penyakit tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan petugas kesehatan harus melakukan pendekatan secara persuasif agar jemaah bersedia menyampaikan kondisi kesehatannya secara jujur.

Penetapan Status Istithaah Kesehatan, merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesehatan haji karena dijadikan landasan penentuan kapasitas calon jemaah terhadap pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji secara aman tanpa membahayakan dirinya maupun orang lain. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan status istithaah kesehatan di Puskesmas Tigo Baleh sudah terlaksana sesuai ketetapan dari Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan). Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan, baik pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kognitif, penilaian kemandirian, maupun hasil pemeriksaan dokter spesialis diinput ke dalam sistem tersebut. Selanjutnya aplikasi akan melakukan pengolahan data secara otomatis sehingga menghasilkan status istithaah kesehatan calon jemaah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status istithaah bukan ditentukan berdasarkan penilaian subjektif petugas kesehatan, melainkan melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai indikator kesehatan sesuai standar nasional. Dalam proses tersebut, Puskesmas berperan sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan sekaligus penginput data, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan validasi data sebelum diteruskan ke sistem nasional. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan status istithaah telah menerapkan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga mampu meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini sesuai dengan Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/2118/2023 yang menyatakan bahwa penetapan status istithaah kesehatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh melalui sistem informasi kesehatan haji.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyakit yang paling banyak mempengaruhi penetapan status istithaah kesehatan adalah hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, obesitas, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas calon jemaah haji termasuk kelompok usia lanjut yang memiliki penyakit degeneratif sehingga memerlukan pemantauan kesehatan secara intensif sebelum keberangkatan. Temuan ini ditunjang oleh laporan Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa penyakit tidak

menular masih menjadi penyebab utama tingginya risiko kesehatan pada jemaah haji Indonesia sehingga pengendalian penyakit kronis menjadi prioritas dalam pembinaan kesehatan haji (Rustika, 2020).

Pencatatan dan Pelaporan, termasuk salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan istithaah kesehatan jemaah haji karena berfungsi sebagai sarana dokumentasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan kesehatan kepada calon jemaah haji. Melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, seluruh informasi mengenai hasil pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan, penetapan status istithaah, serta tindak lanjut pelayanan kesehatan dapat terdokumentasi secara lengkap sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan pada setiap jenjang pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini selaras dengan ketentuan dalam Kepmenkes RI No. HK.01.07/MENKES/2118/2023 yang menjelaskan bahwa seluruh hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji wajib dicatat dan dilaporkan melalui sistem informasi kesehatan haji sebagai dasar penetapan status istithaah kesehatan serta pemantauan kondisi kesehatan jemaah secara nasional. Dengan adanya sistem pencatatan yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh data kesehatan jemaah secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga memudahkan proses evaluasi maupun pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan haji. keberhasilan sistem pencatatan dan pelaporan ditetapkan oleh kecanggihan teknologi informasi sekaligus diberi pengaruh oleh kompetensi petugas kesehatan dalam mengoperasikan sistem informasi kesehatan. World Health Organization (WHO) menyatakan sistem informasi kesehatan yang baik harus mampu menghasilkan data yang akurat, tepat waktu, lengkap, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan maupun evaluasi pelayanan kesehatan (Kurniawan, et al, 2022; Putri, 2025). Dengan demikian, peningkatan kemampuan petugas dalam penggunaan sistem informasi kesehatan menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

Ketersediaan SDM, komponen yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan istithaah kesehatan jemaah haji ialah SDM. Keberadaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta pembagian tugas yang jelas akan mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pembinaan kesehatan, penetapan status istithaah, hingga pencatatan dan pelaporan secara optimal (Permenkes, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi petugas kesehatan terus ditingkatkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan dari Kemenkes ataupun Dinkes Provinsi. Pelatihan tersebut menjadi sangat penting karena setiap tahun terdapat pembaruan terhadap regulasi maupun fitur aplikasi Siskohatkes yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Dengan adanya pelatihan

secara berkelanjutan, petugas kesehatan mampu memahami perubahan kebijakan serta mengoperasikan sistem informasi kesehatan dengan lebih baik sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan program.

Temuan penelitian ini ditunjang oleh teori implementasi kebijakan menurut Edward (Lasidah, et al, 2021) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan disebut sumber daya. Ketersediaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga meliputi kompetensi, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi kebijakan tidak akan berlangsung secara efektif meskipun telah didukung oleh regulasi yang baik tanpa sumber daya manusia yang memadai. Tetapi, temuan studi juga memperlihatkan bahwasanya masih terdapat kendala terkait pemanfaatan SDM. Walaupun secara administratif jumlah petugas yang tercantum dalam SK telah mencukupi, pada pelaksanaan di lapangan hanya beberapa petugas yang secara intensif menangani program kesehatan haji.

Ketersediaan sarana dan prasarana, termasuk unsur penunjang yang sangatlah vital dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan mempermudah tenaga kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pembinaan, penetapan status istithaah, maupun pelayanan kesehatan lainnya kepada calon jemaah haji (Permenkes, 2016). Temuan penelitian ini sesuai dengan konsep sistem rujukan pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh World Health Organization, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan primer tidak harus menyediakan seluruh jenis pelayanan spesialistik, tetapi harus mampu bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang komprehensif (Istiono, 2024). Penerapan sistem rujukan tersebut menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekaligus menjamin mutu pelayanan kesehatan.

Kesimpulan dari temuan penelitian yakni bahwa ketersediaan sarana beserta prasarana di Puskesmas Tigo Baleh telah mendukung penyelenggaraan program istithaah kesehatan. Walaupun fasilitas pemeriksaan lanjutan belum tersedia di puskesmas, sistem rujukan dengan RSUD Bukittinggi mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dalam pembiayaan pemeriksaan kesehatan dijadikan salah satu faktor krusial yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pelaksanaan program istithaah kesehatan secara berkelanjutan melalui peningkatan pembinaan kesehatan, kompetensi tenaga

kesehatan, ketepatan pencatatan digital, serta koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan beban kerja petugas dan peningkatan kesadaran jemaah agar pemeriksaan serta pembinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga kesiapan fisik dan mental jemaah sebelum keberangkatan semakin terjamin.

Keterbatasan penelitian karena hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat menggambarkan pelaksanaan program istithaah kesehatan di seluruh puskesmas atau daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terbatas pada pihak Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, dan jemaah haji, sehingga belum mengakomodasi perspektif seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program kesehatan jemaah haji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 merupakan upaya strategis dalam menjamin kesiapan kesehatan jemaah sebelum melaksanakan ibadah haji. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan program istithaah di puskesmas Tigo Baleh secara umum telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, meliputi pembentukan tim penyelenggara kesehatan haji, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara bertahap, penetapan status istithaah kesehatan, pembinaan kesehatan jemaah, serta pencatatan dan pelaporan. Pelaksanaan istithaah kesehatan haji saat ini juga mengacu pada regulasi turunan yang lebih baru dan ketat, yaitu KMK (Keputusan Menteri Kesehatan) Nomor 508 (KMK No. HK.01.07/MENKES/2118/2023). Regulasi baru ini menerapkan tambahan komponen pemeriksaan (seperti cek urin bagi wanita subur dan skrining demensia/kognitif) agar penegakan status istithaah lebih akurat.

Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan haji, serta implementasi kebijakan publik, dengan memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan program istithaah kesehatan pada tingkat pelayanan kesehatan primer. Temuan penelitian memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem informasi kesehatan, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengikuti pembinaan kesehatan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan lokasi yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti rumah sakit rujukan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, tenaga kesehatan haji, serta jemaah dari berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif atau mixed methods untuk membandingkan implementasi program istithaah kesehatan antarwilayah serta mengukur secara lebih objektif efektivitas pemeriksaan, pembinaan, sistem Siskohatkes, dan penetapan status istithaah dalam meningkatkan kesiapan kesehatan jemaah haji.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies, 1*(1), 173–186. https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605

Al-Ajarma, K. (2021). After Hajj: Muslim pilgrims refashioning themselves. *Religions, 12*(1), Article 36. https://doi.org/10.3390/rel12010036

Aldossari, M., Aljoudi, A., & Celentano, D. (2019). Health issues in the Hajj pilgrimage: A literature review. *Eastern Mediterranean Health Journal, 25*(10), 744–753. https://doi.org/10.26719/2019.25.10.744

Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation, 6*(1), 303–317. https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001

Istiono, W., Sutomo, A. H., Izhar, M. D., & Welembuntu, M. (2024). *Strategi Penerapan Patient Centered Care pada Pelayanan Kesehatan Primer*. UGM Press. https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/keperawatan/strategi-penerapan-patient-centered-care-pada-pelayanan-kesehatan-primer

Kurniawan, F., Ibrahim, R., Nurmala, I., & Harun, M. F. (2022). The relationship between organization and the success of the health information system at the health center in the Kolaka District, Southeast Sulawesi Province. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research, 1*(1), 47–68. https://doi.org/10.55927/modern.v1i1.2542

Lasidah, M., Noor, T., & Rozikin, Z. (2021). Child-friendly district based on local potential: Study implementation of Regent Regulation No. 12 of 2014 concerning child-friendly districts in East Kutai Regency. *International Journal of Scientific and Academic Research, 1*(7), 13–28. https://ijsar.net/index.php/ijsar/article/view/17

Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. *Local Engineering, 2*(1), 31–34. https://doi.org/10.59810/lejlace.v2i1.89

Putri, N. A. (2025). *Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan dalam Meningkatkan Ketepatan dan Perencanaan Program di Fasilitas Kesehatan di Indonesia*.

Roikhan, M. A., & Rahmah, F. S. (2025). *Risk factors for hypertension in Indonesian Hajj pilgrims: A systematic review and meta-analysis* [Preprint]. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2025.07.01.25330661

Rudyanto, C., Damayanti, R., & Junadi, P. (2019). Preparing fit and healthy pilgrims in order to be able to perform Hajj optimally through health policy in Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research & Development, 10*(8), 1415–1419. https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.02096.5

Rustika. (2020). *Kolaborasi Pembinaan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Jemaah Haji dalam Mendukung Istitaah Kesehatan: Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Epidemiologi dan Biostatistik*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perpustakaanbkpkkemkes/index.php?id=38782&keywords=&p=show_detail

Rustika, Oemiati, R., Asyary, A., & Rachmawati, T. (2020). An evaluation of health policy implementation for Hajj pilgrims in Indonesia. *Journal of Epidemiology and Global Health, 10*(4), 263–268. https://doi.org/10.2991/jegh.k.200411.001

Samarkandi, O., Alamri, F., Alsaleh, G., Al Abdullatif, L., Alhazmi, J., Basnawi, M., Alazmy, W., & Khan, A. (2025). Exploring the prevalence of chronic diseases and health status among international Hajj pilgrims. *PLOS ONE, 20*(4), Article e0317555. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317555

Singka, E. J., & Ericca, I. (2020). Hajj health management in Indonesia. *Medical Journal of Indonesia, 29*(2), 117–119. https://doi.org/10.13181/mji.com.204749

Taufik, M. F. (2020). *Penetapan Istithaah Kesehatan bagi Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 5*(2), 198–211. https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236

Widiarti, J. A., Mulyani, T. A. A., Rahmah, N. A., Agustin, C. A. T., & Wakhid, N. (2026). Kajian Konsep Haji dan Umrah sebagai Ibadah Spiritual dalam Islam. *Jurnal Media Akademik, 4*(6). https://doi.org/10.62281/52e9vq27

Wulandari, S., Azizi, S. D. N., & Hidayat, R. T. (2023). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 3*(2), 171–188. https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137

Mustofa, M. B., Wuryan, S., & Harsono, W. (2021). Analisis Manajemen Pelayanan pada Calon Jama'ah Haji dan Umroh: PT Daanish Mika Salsa Tours and Travel. *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, 1*(2), 145–157. https://doi.org/10.32332/multazam.v1i2.5377